

Analisis Faktor Tata Kelola dan Layanan Publik terhadap Efektivitas Retribusi Parkir Kota Blitar

Unga Prey Astanto^{1*}, Dhanan Abimanto², Wasi Sumarsono³

¹⁻³Transportasi, Universitas Maritim AMNI, Indonesia

*Penulis Korespondensi: preyastanto123@gmail.com¹

Abstract. *This study analyzes the influence of Service Quality, Facilities, Supervision, and Effectiveness on Parking Levies (Retribusi Parkir) in Blitar City. Motivated by the Blitar City Transportation Agency's failure to meet its 2022 Local Own-Source Revenue (PAD) target from parking levies, this quantitative study employs Multiple Linear Regression (MLR) on a sample of 100 parking service users. Classical assumption tests confirm the regression model is normally distributed and free from multicollinearity and heteroscedasticity issues. Partially, all independent variables Service Quality ($\beta=0.38$), Facilities ($\beta=0.200$), Supervision ($\beta=0.331$), and Effectiveness ($\beta=0.329$) were found to have a positive and significant effect on Parking Levies. The Adjusted R Square value of 86.8% indicates a high predictive power of the model. Crucially, the findings highlight that Supervision and Effectiveness factors, reflecting internal governance and regulatory enforcement, are the primary determinants of successful parking levy collection, surpassing the influence of direct Facilities and Service Quality. The implications suggest a need for governance reform focusing on strict supervision and digitalization to mitigate revenue leakage.*

Keywords: *Effectiveness of Management; Parking Facilities; Parking Revenue; Parking Supervision; Service Quality*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Pengawasan, dan Efektivitas terhadap Retribusi Parkir di Kota Blitar. Berlatar belakang kegagalan Dinas Perhubungan Kota Blitar mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir pada tahun 2022, studi kuantitatif ini menggunakan pendekatan Multiple Linear Regression (MLR) pada sampel 100 responden pengguna jasa parkir. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan model regresi terdistribusi normal dan bebas dari masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Secara parsial, semua variabel independen—Kualitas Pelayanan ($\beta=0,138$), Fasilitas ($\beta=0,200$), Pengawasan ($\beta=0,331$), dan Efektivitas ($\beta=0,329$)—ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir. Koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 86,8% menunjukkan kekuatan prediksi model yang tinggi. Temuan krusial menyoroti bahwa faktor Pengawasan dan Efektivitas, yang merefleksikan tata kelola internal dan penegakan regulasi, merupakan determinan utama keberhasilan retribusi parkir, jauh melebihi faktor Fasilitas dan Kualitas Pelayanan langsung. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya reformasi tata kelola parkir berbasis pengawasan ketat dan digitalisasi untuk meminimalisir kebocoran pendapatan.

Kata kunci: Efektivitas Pengelolaan; Fasilitas Parkir; Kualitas Pelayanan; Pengawasan; Parkir; Retribusi Parkir

1. LATAR BELAKANG

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari wilayah otonomi masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, PAD berfungsi sebagai indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah. Keberhasilan dalam memungut retribusi, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, sangat penting guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan yang berkelanjutan (Yuliani & Subekti, 2024). Pungutan ini, yang dalam kasus parkir tepi jalan umum diklasifikasikan sebagai Retribusi Jasa Umum, idealnya mencerminkan

kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam membiayai negara sebagai bentuk timbal balik atas layanan publik yang disediakan (Danial, 2022). Oleh karena itu, kegagalan dalam memaksimalkan potensi retribusi parkir mengindikasikan adanya kendala struktural dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan sumber daya lokal.

Pentingnya retribusi parkir sebagai sumber PAD di Kota Blitar terlihat dari penetapan target pendapatan tahunan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Namun, realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Blitar pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Laporan Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir tahun 2022 mencapai Rp 1,1 milyar, nilai ini masih kurang dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 1,5 milyar. Kesenjangan signifikan antara target dan realisasi ini, yang mencapai defisit sebesar 400 juta Rupiah, mengindikasikan adanya kebocoran pendapatan atau ketidakmampuan pemerintah kota dalam menggarap potensi parkir secara maksimal. Situasi ini secara langsung mereduksi kapasitas fiskal daerah dan menghambat upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mendanai program-program pembangunan.

Kesenjangan pendapatan ini diperparah oleh berbagai masalah operasional yang diidentifikasi di lapangan. Masalah tersebut meliputi adanya oknum yang tidak memberikan kardecis parkir resmi kepada pengguna lahan, yang memicu praktik pungutan liar (pungli), kurangnya kedisiplinan petugas parkir pada jam kerja, serta minimnya sarana dan prasarana lokasi parkir. Permasalahan ini bersifat multidimensi, melibatkan aspek yang berkaitan dengan interaksi publik (Kualitas Pelayanan dan Fasilitas) serta aspek tata kelola internal (Pengawasan dan Efektivitas). Untuk memahami secara holistik determinan Retribusi Parkir, penelitian ini menguji empat faktor utama tersebut, yang mencerminkan upaya Dishub dalam meningkatkan Keinginan Membayar Retribusi, kejelasan Biaya Retribusi Parkir, dan pemahaman atas Keuntungan Dalam Membayar Retribusi oleh pengguna jasa.

Berangkat dari identifikasi masalah yang bersifat mendasar tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang terperinci. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara empiris apakah kualitas pelayanan (X1), fasilitas (X2), pengawasan (X3), dan efektivitas (X4) secara parsial dan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Blitar. Pengujian ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi relatif dari setiap variabel dalam mendorong keberhasilan pemungutan retribusi.

Adapun celah penelitian (*research gap*) utama terletak pada kurangnya studi terintegrasi yang secara simultan menguji faktor layanan (X1, X2) dan faktor tata kelola internal (X3, X4) dalam satu model. Penelitian terdahulu sering kali berfokus hanya pada

kontribusi retribusi secara makro (Liswatin, 2022) atau menguji pengaruh parsial variabel layanan terhadap kepuasan pengguna (M. Teguh D. W. & Alif Y. K., 2022). Model yang komprehensif ini penting karena permasalahan retribusi parkir sering kali merupakan perpaduan antara kelemahan infrastruktur dan kelemahan manajemen pengawasan, yang perlu dipisahkan pengaruhnya untuk perumusan kebijakan yang akurat. Model yang diterapkan dalam studi ini berhasil menjelaskan variasi variabel terikat hingga 86,8%, menunjukkan bahwa integrasi keempat variabel ini mampu memberikan gambaran yang sangat lengkap.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada temuan empiris mengenai hierarki faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi Parkir. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor tata kelola internal, yaitu Pengawasan (X3) dengan koefisien $\beta=0,331$ dan Efektivitas (X4) dengan $\beta=0,329$, adalah determinan yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor layanan konsumen seperti Fasilitas (X2) dan Kualitas Pelayanan (X1). Temuan ini memberikan penekanan baru bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, Dinas Perhubungan Kota Blitar harus memprioritaskan reformasi mekanisme pemungutan dan penegakan regulasi, bukan hanya berinvestasi pada peningkatan sarana fisik. Dominasi faktor Pengawasan menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko kebocoran pendapatan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan PAD non-pajak. Secara praktis, temuan ini berfungsi sebagai bahan acuan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Berdasarkan pembuktian dominasi Pengawasan dan Efektivitas, Dinas Perhubungan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terfokus pada penguatan disiplin juru parkir dan penertiban praktik pungutan liar, yang merupakan langkah korektif esensial untuk mencapai target pendapatan yang berkelanjutan (Monika et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang ditarik berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Danial, 2022). Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan ini terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam klasifikasi ini, retribusi pelayanan parkir di

tepi jalan umum secara spesifik termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Fungsi Retribusi Daerah melampaui sekadar pengumpulan dana. Retribusi memiliki empat fungsi utama, yaitu: fungsi anggaran (sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara), fungsi mengatur (sebagai alat penggerak masyarakat dalam perekonomian), fungsi stabilitas (untuk mengendalikan dampak inflasi), dan fungsi redistribusi pendapatan (untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan) (Ashari, 2006). Dalam konteks parkir, fungsi mengatur menjadi sangat krusial, di mana retribusi digunakan untuk mengendalikan penggunaan ruang publik dan menertibkan arus lalu lintas (SKarakulak & Gülhan, 2021). Landasan hukum pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar secara khusus diatur dalam Peraturan Kota Blitar No. 5 Tahun 2022, yang menjadi acuan tata cara pemungutan, penetapan struktur, dan besarnya tarif.

Tinjauan Variabel Independen

Kualitas Pelayanan (X1)

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai perbandingan antara layanan yang dirasakan oleh pelanggan (*perceived service*) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan (*expected service*) (Purwani & Wahdiniwati, 2017). Suatu layanan dikatakan berkualitas tinggi apabila ia mampu memenuhi atau melebihi ekspektasi konsumen (Aris & Deffi, 2020). Dalam konteks layanan publik seperti perparkiran, kualitas pelayanan merupakan unsur terpenting yang menentukan keputusan pengguna jasa. Dimensi kualitas pelayanan yang diadopsi dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama: 1) *Reliability* (Kehandalan), yaitu kemampuan petugas memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat; 2) *Responsiveness* (Ketanggapan), yaitu keinginan petugas untuk membantu dan memberikan layanan dengan cepat; dan 3) *Empathy* (Empati), yaitu kemampuan petugas menjalin hubungan, komunikasi, dan memahami kebutuhan individual pelanggan (Ma'ruf, et al., 2020).

Fasilitas (X2)

Fasilitas (X2) merujuk pada layanan infrastruktur fisik yang disediakan bagi pengguna lahan parkir sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan. Fasilitas ini merupakan kompensasi fisik yang diterima pengguna atas pembayaran retribusi. Variabel ini diukur melalui tiga indikator: 1) Ketersediaan Lahan Parkir (X2.), yaitu lokasi tempat berhenti yang memadai; 2) Ketersediaan Prasarana Pembantu (X2.2), yang mencakup marka parkir, kanopi, dan pos jaga; dan 3) Ketersediaan Sarana Pembantu (X2.3), yang meliputi karcis parkir, peluit, dan rompi petugas. Ketersediaan sarana, seperti karcis parkir resmi, merupakan elemen krusial karena ketiadaannya dapat menjadi celah terjadinya pungutan liar (*pungli*), yang secara langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap keabsahan retribusi yang dipungut (Danial,

2022).

Pengawasan (X3)

Pengawasan (*controlling*) adalah proses sistematis yang dilakukan pimpinan atau badan pengawas untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan (Djadjuli, 2017). Dalam konteks retribusi parkir, pengawasan (X3) berfokus pada mekanisme pencegahan penyimpangan dan pengamanan pendapatan. Indikator yang diukur meliputi: 1) Kinerja Petugas Parkir (X3.); 2) Ketelitian Petugas Parkir (X3.2) dalam menjalankan tugas; dan 3) Penerimaan Retribusi Parkir (X3.3), yang memastikan dana yang terkumpul masuk ke kas daerah. Pengawasan yang lemah, terutama terkait moral hazard seperti pungli dan penggelapan karcis, merupakan risiko terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencapai target PAD Retribusi (Monika et al., 2025).

Efektivitas (X4)

Efektivitas (X4) adalah dimensi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Efektivitas pengelolaan retribusi parkir diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang direncanakan. Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1994, adalah Sangat Efektif (>100%) atau Efektif (90-100%). Variabel ini diukur melalui tiga indikator kinerja operasional petugas: 1) Kuantitas (X4.), meliputi kelengkapan peralatan dan ketersediaan lahan parkir; 2) Kualitas (X4.2), mencakup mutu pelayanan dan kesesuaian tarif; dan 3) Waktu (X4.3), yang menilai kecepatan dan durasi parkir. Efektivitas yang tinggi mencerminkan tata kelola kinerja Dishub yang solid dan kemampuan untuk menutup defisit pendapatan.

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Penelitian Terdahulu Terkait Kualitas Pelayanan (X1)

Studi mengenai kualitas pelayanan dalam sektor perparkiran menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian oleh Teguh & Alif (2022) di Bojonegoro menemukan bahwa dimensi *tangible*, *responsiveness*, dan *emphaty* (bagian dari X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa parkir. Sementara itu, penelitian Ramadhani et al. (2025) menemukan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.6 Meskipun temuan ini mendukung hipotesis bahwa layanan yang baik mendorong kepatuhan dan kesediaan membayar, studi ini perlu membandingkan pengaruh X1 dengan faktor tata kelola, terutama dalam lingkungan yang memiliki masalah integritas pemungutan.

Penelitian Terdahulu Terkait Fasilitas (X2) dan Pengawasan (X3)

Faktor Fasilitas dan Pengawasan sering kali terkait erat dengan isu tata kelola. Bella & Rila (2022) dalam studi mereka di Kota Serang menyoroti bahwa pengawasan Dinas Perhubungan menghadapi hambatan besar, termasuk kurangnya personel lapangan dan sifat retribusi yang tidak memaksa seperti pajak, yang semuanya berkorelasi dengan masalah pungutan liar. Isu ini diperkuat oleh temuan penelitian di Palangka Raya yang mencatat masalah pungutan liar, tarif tidak konsisten, dan ketiadaan karcis resmi (Danial, 2022). Kebutuhan akan pengawasan yang ketat (X3) sebagai mekanisme pencegahan kebocoran ditekankan oleh Monika et al. (2025), yang menyarankan penegakan sanksi tegas karena banyaknya juru parkir ilegal yang memungut tarif tidak sesuai (Monika et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan variabel kunci dalam mengamankan pendapatan daerah.

Penelitian Terdahulu Terkait Efektivitas (X4) dan Tata Kelola

Efektivitas kinerja pengelolaan retribusi (X4) merupakan indikator langsung dari keberhasilan kebijakan. Rabiyyah & Firman (2021) meneliti analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Makassar. Konsistensi temuan Liswatin (2022) yang membahas inovasi pengelolaan retribusi untuk peningkatan PAD turut menunjang pentingnya variabel X4. Tantangan yang dihadapi Kota Blitar, dengan realisasi retribusi sekitar 73% dari target, sangat kontras dengan rata-rata efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Dompu yang mencapai 94,35% (Jurnal Administrasi Publik Digital, 2025). Perbedaan ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas operasional, sering kali melalui reformasi tata kelola fiskal berbasis transparansi dan akuntabilitas (Sari & Halim, 2020), sangat diperlukan untuk mencapai target PAD.

Sintesis dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Pengawasan, dan Efektivitas merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan layanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah, penelitian ini merumuskan empat hipotesis utama:

H1: Diduga Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir di Kota Blitar.

H2: Diduga Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir di Kota Blitar.

H3: Diduga Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir di Kota Blitar.

H4: Diduga Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir di Kota Blitar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain observasional analitik (*cross-sectional*), bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti dalam proses waktu yang bersamaan (Setia, 2016). Metode ilmiah yang diterapkan dalam proses ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna fasilitas parkir di Kota Blitar yang berjumlah 582.687 jiwa. Karena ukuran populasi yang besar, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan batas kelonggaran kesalahan (e) sebesar 10%. Perhitungan ini menghasilkan jumlah sampel sebesar 99,90, yang dibulatkan menjadi 100 responden. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *sampling insidental*, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi spesifik yaitu individu yang berdomisili di Blitar atau non-Blitar, berusia 17-45 tahun, dan sering parkir di kawasan Kota Blitar lebih dari empat kali. Kriteria ini memastikan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan penilaian yang valid terhadap kualitas layanan dan pengelolaan parkir Dishub.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang menggunakan skala Likert lima tingkat (Sangat Setuju hingga Sangat Tidak Setuju). Metode pengumpulan data lainnya meliputi Observasi, Wawancara, Studi Pustaka (untuk meninjau penelitian terdahulu), dan Dokumentasi (laporan Dinas Perhubungan). Analisis data yang dilakukan adalah Analisis Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan mereka, serta Analisis Kuantitatif untuk menguji hipotesis. Teknik analisis kuantitatif utama adalah *Multiple Linear Regression* (MLR) yang dioperasikan melalui perangkat lunak SPSS V.26. Sebelum pengujian hipotesis, data diuji validitas (r hitung $>$ r tabel 0,2565) dan reliabilitas (Cronbach's Alpha $>$ 0,7), yang keseluruhannya menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinearitas) juga diterapkan untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Saputro et al., 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2021 dan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pengelolaan parkir, dan, yang paling penting, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambaran Umum Responden dan Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil kuesioner, identitas 100 responden yang menggunakan layanan parkir di Kota Blitar didominasi oleh laki-laki (54%), kelompok usia 17-21 tahun (63%), dan berpendidikan tinggi (73%). Karakteristik demografis ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna jasa parkir adalah masyarakat usia produktif yang mungkin memiliki kesadaran hukum dan ekspektasi layanan yang relatif tinggi. Analisis data kuantitatif dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik untuk memverifikasi kelayakan model regresi.

Pengujian asumsi klasik menunjukkan model regresi memenuhi kriteria ideal. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) menghasilkan nilai signifikansi 0,074, yang lebih besar dari 0,05, menegaskan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) menghasilkan nilai $DW = 1,938$. Nilai ini berada dalam rentang $d\{u\} = 1,7582$ dan $4-d\{u\} = 2,2418$, yang berarti tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. Lebih lanjut, Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel bebas berada di bawah batas 10 (maksimum VIF 4,030) dan nilai *Tolerance* berada di atas 0,1 (minimum *Tolerance* 0,248), sehingga model bebas dari masalah multikolinearitas. Terakhir, Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen lebih besar dari 0,05 (minimum 0,580), memastikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari Kualitas Pelayanan (X1), Fasilitas (X2), Pengawasan (X3), dan Efektivitas (X4) terhadap Retribusi Parkir (Y).

Model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,772 + 0,138X_1 + 0,200X_2 + 0,331X_3 + 0,329X_4 + \mu$$

Koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,868 atau 86,8%. Nilai ini menunjukkan bahwa 86,8% variasi dalam variabel Retribusi Parkir (Y) dapat

dijelaskan oleh variasi gabungan dari keempat variabel bebas. Tingkat penjelasan ini mengindikasikan bahwa model penelitian sangat kuat, dan hanya 13,2% variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model (μ).

Tabel 1. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien B	t hitung	t tabel (df=96)	Sig.	Keputusan H
Kualitas Pelayanan (X1)	0,138	2,019	1,66088	0,007	H1 Diterima
Fasilitas (X2)	0,200	2,898	1,66088	0,003	H2 Diterima
Pengawasan (X3)	0,331	2,488	1,66088	0,001	H3 Diterima
Efektifitas (X4)	0,329	2,743	1,66088	0,001	H4 Diterima

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Retribusi Parkir (Y)

Kualitas Pelayanan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,019 yang lebih besar dari t_{tabel} (1,66088), dengan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi (β) untuk X1 adalah 0,138. Secara deskriptif, responden menunjukkan persetujuan tinggi bahwa Kehandalan (X1.1), Ketanggapan (X1.2), dan Empati (X1.3) petugas sudah cukup baik, dengan tingkat persetujuan (Setuju dan Sangat Setuju) mencapai 75% hingga 85% untuk tiap indikator. Meskipun signifikan, X1 menduduki peringkat terakhir dalam hal besaran koefisien pengaruh. Ini menunjukkan bahwa meskipun layanan yang baik mendorong kepuasan pengguna (M. Teguh D. W. & Alif Y. K., 2022), perbaikan pada aspek interaksi personal (keramahan, ketanggapan) hanya memberikan dorongan minimal pada peningkatan penerimaan retribusi. Kualitas pelayanan, dalam hal ini, lebih cenderung dipandang sebagai faktor kebersihan dasar (*hygiene factor*) yang wajib dipenuhi, tetapi bukan pendorong utama peningkatan pendapatan fiskal.

Pengaruh Fasilitas (X2) terhadap Retribusi Parkir (Y)

Variabel Fasilitas (X2) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir (Y), dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,898 dan signifikansi 0,003. Koefisien regresi (β) adalah 0,200. Mayoritas responden (lebih dari 82%) setuju bahwa Ketersediaan Lahan Parkir (X2.1) dan Ketersediaan Prasarana Pembantu (X2.2) sudah memadai. Fasilitas fisik yang memadai, seperti lahan parkir yang jelas dan sarana pendukung (karcis, rompi), merupakan syarat dasar untuk pelaksanaan retribusi yang tertib (Karakulak & Gülhan, 2021). Namun, Fasilitas berada di peringkat ketiga dalam kekuatan pengaruhnya. Koefisien 0,200 mengindikasikan bahwa meskipun investasi infrastruktur penting, keberhasilan retribusi tidak hanya bergantung pada adanya fasilitas, melainkan pada bagaimana fasilitas tersebut dikelola untuk mencegah penyimpangan. Misalnya, ketiadaan karcis resmi (X2.3) merupakan masalah

yang mengarah pada isu tata kelola (Danial, 2022).

Pengaruh Pengawasan (X3) terhadap Retribusi Parkir (Y): Faktor Dominan

Variabel Pengawasan (X3) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan yang paling dominan terhadap Retribusi Parkir (Y) di Kota Blitar. Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} = 2,488$ dengan signifikansi 0,001. Koefisien regresi (B) untuk X3 adalah 0,331, menjadikannya faktor dengan pengaruh parsial terbesar. Dominasi Pengawasan dalam model ini memberikan bukti empiris bahwa masalah utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Blitar terkait kegagalan mencapai target PAD 2022 adalah kebocoran pendapatan yang diakibatkan oleh kurangnya integritas dalam pemungutan. Pengawasan yang efektif terhadap Kinerja Petugas Parkir (X3.) dan Ketelitian dalam Penerimaan Retribusi (X3.3) berfungsi sebagai mekanisme koreksi langsung terhadap praktik pungutan liar dan ketidakdisiplinan yang diakui sebagai masalah di lapangan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk meminimalisir moral hazard yang merugikan keuangan daerah (Bella & Rila, 2022).

Pengaruh Efektivitas (X4) terhadap Retribusi Parkir (Y): Faktor Dominan Kedua

Efektivitas (X4) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang sangat kuat, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,743 dan signifikansi 0,001. Koefisien regresi (β) untuk X4 adalah 0,329. Koefisien ini berada di peringkat kedua, hampir setara dengan Pengawasan. Efektivitas mencerminkan kualitas tata kelola kinerja Dishub dalam mencapai target melalui optimalisasi Kuantitas (X4.), Kualitas (X4.2), dan Waktu (X4.3). Kedekatan pengaruh antara X3 (Pengawasan) dan X4 (Efektivitas) menunjukkan hubungan kausalitas yang erat: pengawasan yang ketat secara langsung menghasilkan kinerja operasional yang lebih efektif. Efektivitas tinggi, diukur dari realisasi yang mendekati target (seperti yang dicapai di daerah lain, Rabiyyah & Firman, 2021) 1, adalah kunci untuk menutup defisit target PAD yang terjadi pada tahun 2022.

Komparasi Hierarki Faktor dan Implikasi Manajerial

Temuan utama penelitian ini adalah adanya hierarki pengaruh yang jelas, di mana faktor Tata Kelola Internal (Pengawasan dan Efektivitas) secara kolektif jauh lebih dominan dalam menentukan keberhasilan Retribusi Parkir dibandingkan faktor Layanan Konsumen (Fasilitas dan Kualitas Pelayanan). Koefisien yang diperoleh membuktikan hal ini: $B\{X3\}=0,331$ dan $B\{X4\}=0,329$ versus $B\{X2\}=0,200$ dan $B\{X1\}=0,138$.

Tabel 2. Peringkat Pengaruh Variabel Independen terhadap Retribusi Parkir

Peringkat	Variabel Independen	Koefisien Tidak Standar (B)	Kategori Pengaruh
1	Pengawasan (X3)	0,331	Tata Kelola Internal (Integritas)
2	Efektifitas (X4)	0,329	Tata Kelola Internal (Kinerja)
3	Fasilitas (X2)	0,200	Layanan Publik (Infrastruktur)
4	Kualitas Pelayanan (X1)	0,138	Layanan Publik (Interaksi)

Hal ini berimplikasi manajerial mendalam bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Meskipun pelayanan harus dijaga, fokus utama untuk memulihkan defisit PAD harus diarahkan pada perbaikan sistem internal. Strategi harus bergeser dari fokus pada infrastruktur dan keramahan petugas (X1 dan X2) menuju penguatan integritas, penegakan disiplin, dan pengamanan transaksi (X3 dan X4).

Komparasi Isu Tata Kelola dan Kebocoran Pendapatan

Isu-isu operasional yang dihadapi Kota Blitar seperti pungutan liar dan tidak diberikannya karcis resmi bukanlah masalah terisolasi. Kasus serupa terjadi di Kota Serang (Bella & Rila, 2022) dan Palangka Raya (Danial, 2022), di mana pengawasan yang tidak tegas terhadap juru parkir ilegal mengakibatkan kebocoran PAD. Dalam konteks makro, tantangan ini mencerminkan kelemahan yang lebih besar dalam sistem pemungutan daerah (*weak collection systems*) yang diidentifikasi sebagai kendala PAD di berbagai provinsi (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2025). Dominasi variabel Pengawasan (X3) memvalidasi bahwa titik kritis dalam meningkatkan retribusi parkir adalah mengatasi kelemahan tata kelola ini. Keterbatasan sumber daya manusia dan metode pengelolaan yang masih manual (Bella & Rila, 2022) merupakan faktor yang memperparah masalah pengawasan dan efektivitas.

Analisis Novelty dan Arah Kebijakan

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa di lingkungan di mana kebocoran pendapatan merupakan masalah yang diakui, reformasi tata kelola internal (Pengawasan dan Efektivitas) menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan Retribusi Parkir, melampaui faktor layanan langsung. Untuk mengimplementasikan Pengawasan dan Efektivitas yang berkelanjutan, langkah strategis yang harus diambil adalah adopsi teknologi. Penerapan digitalisasi, seperti sistem *e-parking* atau Terminal Parkir Elektronik (TPE), dapat secara fundamental memperkuat Pengawasan (X3) dan Efektivitas (X4). Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi adalah peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD, sekaligus mengatasi keterbatasan SDM dan meminimalkan interaksi tunai yang rawan moral hazard (Sari & Halim, 2020). Transparansi fiskal yang ditingkatkan melalui teknologi akan secara otomatis mendorong kepatuhan wajib retribusi dan menutup celah-celah kebocoran yang menyebabkan defisit target PAD di Kota

Blitar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Kualitas Pelayanan (X1), Fasilitas (X2), Pengawasan (X3), dan Efektivitas (X4) seluruhnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Parkir (Y) di Kota Blitar. Model regresi yang digunakan memiliki kekuatan prediksi yang sangat tinggi, dibuktikan dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 86,8%, menunjukkan bahwa keempat variabel ini adalah determinan utama keberhasilan Retribusi Parkir. Temuan krusial penelitian ini adalah adanya hierarki pengaruh, di mana Pengawasan (X3) dengan koefisien 0,331 dan Efektivitas (X4) dengan koefisien 0,329 merupakan faktor paling dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama dalam pencapaian target PAD Kota Blitar adalah kelemahan dalam tata kelola internal dan pengawasan terhadap integritas pemungutan retribusi, yang harus diprioritaskan di atas peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan dasar.

Saran dan Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran utama ditujukan pada penguatan faktor Pengawasan (X3) dan Efektivitas (X4). Dinas Perhubungan Kota Blitar wajib memperketat pengawasan terhadap kinerja petugas parkir di lapangan untuk menertibkan praktik pungutan liar dan memastikan setiap pengguna jasa menerima karcis resmi. Pengawasan harus dilakukan secara insidental dan diikuti dengan penerapan sanksi administratif dan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, sesuai dengan rekomendasi Bella & Rila (2022).

Secara strategis, untuk mencapai Efektivitas yang berkelanjutan dan memitigasi risiko Pengawasan yang lemah, Dinas Perhubungan disarankan untuk segera mengadopsi sistem pemungutan retribusi parkir berbasis teknologi, seperti implementasi *e-parking*. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional (X4), sekaligus memperkuat Pengawasan (X3) dengan meminimalkan celah kebocoran pendapatan.² Untuk penelitian selanjutnya yang relevan, disarankan untuk memperluas lingkup variabel bebas dengan memasukkan faktor eksternal seperti Kesadaran Wajib Retribusi atau Sanksi Perpajakan, yang dapat menjelaskan sisa variasi 13,2% yang tidak terungkap dalam model ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bella, A., & Rila, K. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir Kota Serang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *YUSTISIA TIRTAYASA: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 54–61. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13116>
- Danial, R. (2022). Efektivitas pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Muqoddimah Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Liswatin, L. (2022). Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe. *SIBATIK JOURNAL*, 1(9). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15>
- M. Teguh D. W., & Alif, Y. K. (2022). Analisis kepuasan pengguna jasa petugas parkir Dinas Perhubungan Bojonegoro menggunakan regresi logistik ordinal. *STATKOM: Jurnal Statistika Dan Komputasi*, 1(1). <https://doi.org/10.32665/statkom.v1i1.442>
- Monika, D., Andora, H., & Rosari, A. (2025). Pengawasan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh. *Ranah Research Journal (R2J)*, 7(3). <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i3.1414>
- Ramadhani, R., Yulianti, P. K., Ramli, R., & Kusno, H. S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak: Uji empiris pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 1–18.
- Sarıca Karakulak, E., & Gülhan, G. (2021). A new paradigm in parking management: From quantitative models to stakeholder participation. *Journal of Design for Resilience in Architecture & Planning*, 2(1), 101–114.
- Sari, M., & Halim, A. (2020). Pengaruh kemandirian fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–67.
- Sevira, V., & Meirinawati. (2021). Kualitas pelayanan parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Publika Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 227–240. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p227-240>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ulfa Rabiyyah, & Firman. (2021). Analisis penerapan potensi dan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.53654/mv.v3i1.170>
- Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh pajak parkir, retribusi parkir, dan efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1).
- Yuliani, D., & Subekti, A. (2024). Strategi kolaboratif peningkatan PAD melalui penguatan BUMD dan kemitraan swasta. *Jurnal Keuangan Daerah Berkelanjutan*, 4(1), 21–38.